

# RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018-2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA BATU**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah (Renstra Bappelitbangda) adalah dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kota Batu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Batu untuk masa waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Renstra Bappelitbangda Kota Batu berfungsi sebagai alat penerjemah dan pengendali dalam sinkronisasi dan sinergitas berbagai tujuan dan sasaran pembangunan secara nasional dan regional. Renstra ini terkait dengan tugas dan fungsi perencanaan yang diwujudkan dalam rencana kerja (Renja) Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun kedepan.



Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap evaluasi kinerja Bappelitbangda.

Proses penyusunan renstra Bappelitbangda berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Secara garis besar tahapan penyusunan terdiri dari proses persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra, dan penetapan renstra.

Dalam tahap persiapan, proses dimulai dengan pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi. Dalam tahap penyusunan rancangan Renstra, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Bappelitbangda, telaah Renstra Bappenas dan Bappeprov Jawa Timur, penelaahan RTRW Kota Batu, analisis terhadap dokumen KLHS, perumusan isu strategis, serta perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda. Setelah rancangan Renstra Batu tersusun, dilaksanakan forum OPD untuk mengkomunikasikan rancangan renstra atas kebutuhan pelayanan 5 (lima) tahun mendatang, serta memperoleh penajaman dan penyepakatan. Setelah mendapat evaluasi dalam forum OPD, rancangan renstra disajikan dalam sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, rancangan renstra dikaji ulang terhadap RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022 untuk mempertajam keselarasannya. Selain itu, rancangan Renstra kembali dibahas dengan unit kerja dalam Bappelitbangda. Hasilnya disajikan dalam rancangan akhir Renstra. Sebagai tahap akhir, rancangan akhir Renstra Bappelitbangda ditetapkan oleh Kepala Bappelitbangda.



Renstra Bappelitbangda yang merupakan perencanaan jangka menengah Bappelitbangda memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan lain di tingkat nasional, provinsi, maupun OPD. Terkait dengan Renstra Bappenas dan Bappeprov, Renstra Bappelitbangda mensinergikan berbagai substansi dalam Renstra Bappenas dan Bapperov Jawa Timur menjadi isu strategis yang sebagian ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan. Renstra Bappelitbangda mengacu pada Renstra Bappenas dan Bappeprov. Terkait dengan RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022, Renstra Bappelitbangda sepenuhnya berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut. Renstra Bappelitbangda menindaklanjuti program-program dalam RPJMD dengan menetapkan berbagai kegiatan pembangunan. Semua indikator kinerja dalam RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda harus masuk dalam Renstra Bappelitbangda. Hal ini menunjukkan bahwa Renstra Bappelitbangda mendukung berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Bappelitbangda menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Bappelitbangda. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Bappelitbangda diuraikan dalam Renja Bappelitbangda.

Eksistensi Renstra Bappelitbangda secara makro menjadi sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sub sistem yang harus selaras, sesuai, dan mendukung berbagai substansi penting dalam sistem induknya, yaitu sistem pembangunan nasional, dalam menyelenggarakan berbagai urusan pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);





2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan yang Berkeadilan;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.
  22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030; dan
  24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;



26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022.
27. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda adalah mewujudkan dokumen perencanaan kinerja Bappelitbangda Kota Batu yang berkualitas, yang dapat menjadi arahan dan pedoman umum bagi Bappelitbangda Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Batu adalah:

1. Menterjemahkan berbagai substansi perencanaan dalam RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda.
2. Menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, program pembangunan, dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2018-2022.
3. Menetapkan indikator kinerja Bappelitbangda yang berdasar pada RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Bappelitbangda Kota Batu 2018-2022 didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang pengertian Renstra, fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra, dan keterkaitan Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD Kota Batu, Renstra Bappenas, Renstra



Bappeprov Jawa Timur, dan Renja SKPD. Selain itu, juga memaparkan mengenai landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Bappelitbangda Kota Batu tahun 2018-2022.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memaparkan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappelitbangda, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kinerja keuangan, tantangan dan peluang pelayanan, telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030, dan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memaparkan tentang permasalahan lingkup Bappelitbangda berdasarkan tugas dan fungsi, berdasarkan visi dan misi kepala daerah, berdasarkan telaah Renstra Bappelitbangda dan Bappeprov Jawa Timur, berdasarkan telaah RTRW dan KLHS. Selain itu juga memaparkan isu strategis yang berkembang dalam dinamika internasional, nasional, regional, dan lain-lain, dan menyebutkan isu-isu strategis yang ditangani dalam periode Renstra Kota Batu tahun 2017-2022.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Dalam upaya menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Termasuk penetapan indikator sasaran dalam mengkonkretkan gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.





## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memaparkan tentang program dan kegiatan Bappelitbangda yang penetapannya didasarkan pada penjabaran visi dan misi. relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memaparkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja yang akan diukur oleh Bappelitbangda Kota Batu dalam periode kerja tahun 2018-2022.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemerintah Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu**. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Bappelitbangda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bappelitbangda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bappelitbangda mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappelitbangda yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut adalah bahwa Bappelitbangda Kota Batu tersusun atas :

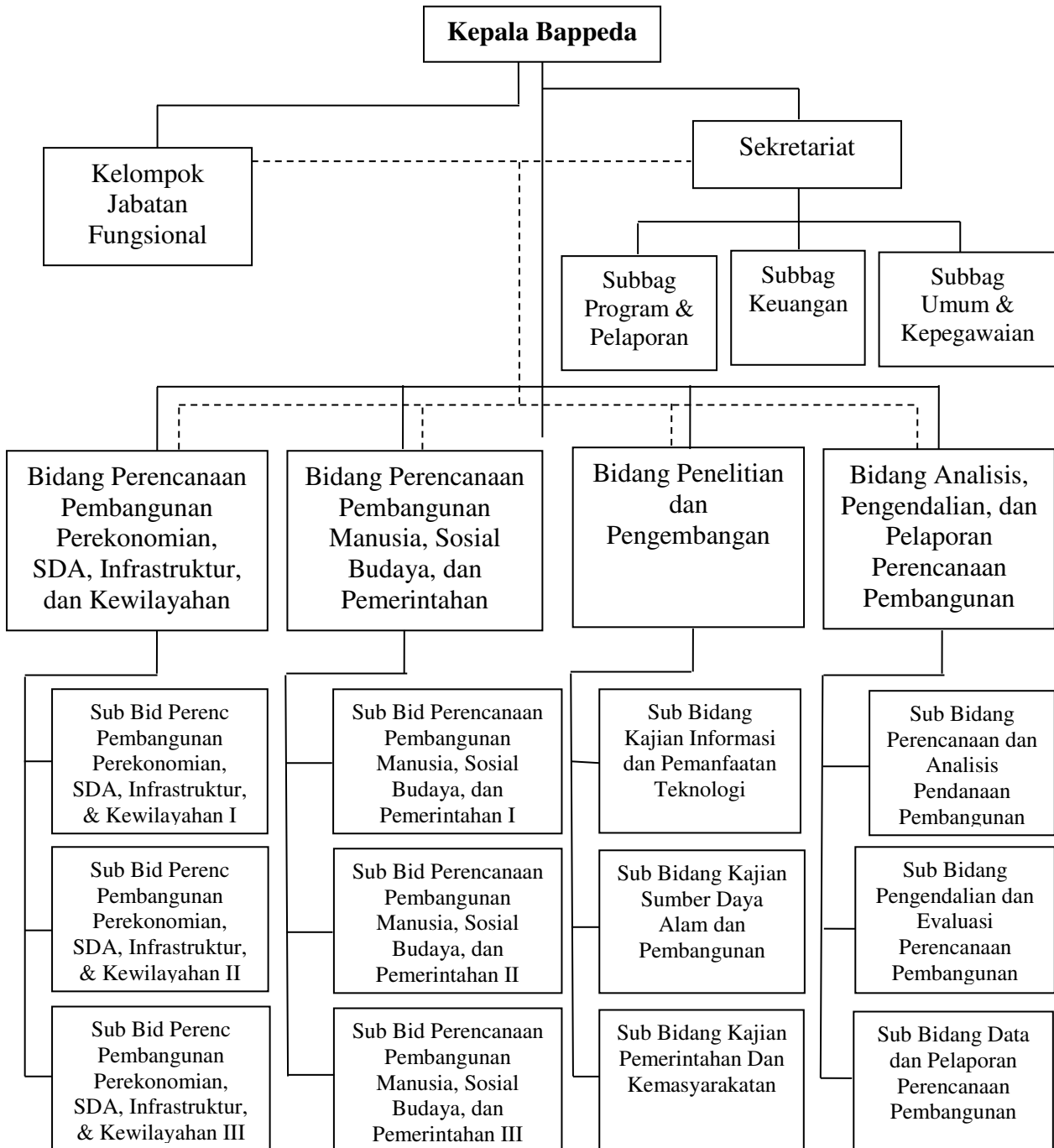
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan, membawahi:



- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan I;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan II; dan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan III.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan, membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan I;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan II; dan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan III.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- a. Sub Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi;
  - b. Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Kajian Pemerintahan Dan Kemasyarakatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Diagram 2.1**  
**Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Batu**



Garis komando —————

Garis koordinasi - - - - -





Penjabaran tugas dan fungsi dari Bappelitbangda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda.

- a. Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Bappeda memiliki fungsi :
  - 1) perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 2) penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 3) penyelenggaraan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 4) penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 5) penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
  - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;



3. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan urusan rumah tangga;
  6. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
  7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Bidang;
  9. pengelolaan kearsipan Badan;
  10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  11. pengelolaan administrasi keuangan; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sekretariat membawahi tiga sub bagian yaitu :
- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
    - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
    - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;
    - c. melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
    - d. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
    - e. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
    - f. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - g. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
    - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
  - 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:



- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
  - b. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
  - c. mengelola kearsipan Badan;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;
  - f. melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
  - g. menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
  - h. mempersiapkan rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;
  - i. menyusun analisis jabatan pegawai;
  - j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
  - m. menyusun usulan pensiun;



- n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja badan;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan :
- a. mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang analisis, pengendalian dan pelaporan.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    - 1) penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
    - 2) perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
    - 3) pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
    - 4) pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
    - 5) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
    - 6) pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD, RPJMD, dan KUA PPAS;
    - 7) penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, KUA PPAS, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota/Wakil Walikota; dan
    - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.
  - c. Bidang Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan membawahi tiga sub bidang yaitu :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
      - a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;



- b. menyiapkan bahan dan data analisis dan perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. menyiapkan bahan dan data analisis kerangka ekonomi makro daerah;
  - d. menyiapkan bahan, data, dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
  - e. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, dan KUA PPAS; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. menyiapkan bahan, data, dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja program pembangunan;
  - c. menyiapkan bahan dan data evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD terhadap target capaian RPJMD dan RKPD;
  - d. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD perubahan dan KUA PPAS perubahan;
  - e. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
  - f. mengolah bahan dan data capaian kinerja perencanaan pembangunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 3) Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas sebagai berikut:





- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mengolah data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  - d. mengolah bahan dan data penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota (LKPJ); dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan :
- a. mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    - 1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
    - 2) pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;
    - 3) penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
    - 4) penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
    - 5) perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
    - 6) pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;



- 7) pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
  - 8) penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;
  - 9) pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan membawahi tiga sub bidang yaitu :
- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan I mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
    - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
    - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
    - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;
    - e. menyiapkan data dan informasi serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
    - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
    - g. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
    - h. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan



- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan II mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
  - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
  - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
  - h. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan III mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;



- c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
  - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
  - h. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan :
- a. Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - 1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
    - 2) pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;



- 3) penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan;
  - 4) penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - 5) perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
  - 6) pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
  - 7) pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
  - 8) penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;
  - 9) pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi tiga sub bidang yaitu :
- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan I mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
    - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
    - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
    - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;





- e. menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
  - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
  - h. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan II mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
  - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
  - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;



- g. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
  - h. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
  - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;
  - f. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
  - h. menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.



6. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
- a. Mempunyai tugas merumuskan, mengkaji, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - 1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
    - 2) penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
    - 3) penyusunan dan pelaksanaan kajian dan analisis daerah mengenai isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
    - 4) pengoordinasian dan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga atau instansi terkait;
    - 5) penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan sumber daya alam dan pembangunan;
    - 6) penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur, dan kewilayahan;
    - 7) penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi dan pemanfaatan teknologi;
    - 8) pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengkajian, dan perencanaan pembangunan daerah; dan
    - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi tiga sub bidang yaitu :
    - 1) Sub Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:
      - a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
      - b. menyusun kerangka studi, instrumen analisis, dan melakukan penelitian lapangan;



- c. mengoordinasikan teknis kegiatan penelitian dan kerja sama penelitian dengan lembaga atau instansi terkait;
  - d. mengolah bahan dan data hasil analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. mengolah laporan hasil penelitian, kajian, dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - f. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian, dan pengembangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.
- 2) Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. mengoordinasikan teknis kegiatan penelitian serta kerjasama penelitian dengan lembaga atau instansi terkait;
  - c. menghimpun dan mengolah data analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. mengolah laporan hasil penelitian, kajian dan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
  - e. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian dan pengembangan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Kajian Pemerintahan dan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
  - b. mengoordinasikan teknis kegiatan penelitian serta kerja sama penelitian dengan lembaga atau instansi terkait;
  - c. menghimpun dan mengolah data analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;



- d. mengolah laporan hasil penelitian, kajian, dan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- e. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian, dan pengembangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya

## 2.2. Sumber Daya Bappelitbangda

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Bappelitbangda didukung oleh 52 orang personil yang terdiri dari 43 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 6 lainnya adalah Tenaga Honorer Daerah 3 Tenaga Outsourcing. Lebih jelasnya lihat tabel 2.1. berikut

Tabel 2.1

Data Pegawai Negeri Sipil di Bappelitbangda Batu

| Komponen        |             |    | Keterangan (%) |
|-----------------|-------------|----|----------------|
| Jumlah Pegawai  | L           | 36 |                |
|                 | P           | 16 |                |
|                 | Jumlah      | 52 |                |
| Golongan/Ruang  | IV / c      | 1  |                |
|                 | IV / b      | 1  |                |
|                 | IV/a        | 3  |                |
|                 | III / d     | 13 |                |
|                 | III/c       | 16 |                |
|                 | III/b       | 2  |                |
|                 | III/a       | 1  |                |
|                 | II/d        | 4  |                |
|                 | II/c        | 1  |                |
|                 | II/b        | 1  |                |
|                 | II/a        | 0  |                |
|                 | Honorer     | 6  |                |
|                 | Outsourcing | 3  |                |
| Ijazah Terakhir | S3          | 0  |                |
|                 | S2          | 14 |                |
|                 | S1          | 33 |                |
|                 | D3          | 1  |                |
|                 | SMA         | 4  |                |

Sumber : Bappeda Tahun 2017.



Kondisi SDM aparatur Bappelitbangda menurut tingkat pendidikan sudah cukup memadai, kondisi ini ditunjukkan dengan sebagian besar aparatur Bappeda berpendidikan tinggi. Sumber daya aparatur berijazah dibawah D3 cenderung merupakan tenaga honorer yang sifat pekerjaannya merupakan pekerjaan kebersihan dan keamanan.

### **2.2.2. Sumber Daya Aset**

Sumber daya aset yang dimiliki Bappelitbangda Kota Batu disajikan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

Data Sarana dan Prasarana

| <b>No</b> | <b>Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah Barang</b> |
|-----------|--|---------------|----------------------|
| 1         | Jeep   | Unit          | 1                    |
| 2         | Station Wagon                                    | Unit          | 2                    |
| 3         | Sepeda Motor                                     | Unit          | 19                   |
| 4         | Global Positioning System                        | Buah          | 2                    |
| 5         | Mesin Ketik Manual Portable (11-13)              | Buah          | 1                    |
| 6         | Mesin Ketik Elektronik                           | Buah          | 1                    |
| 7         | Mesin Calculator                                 | Buah          | 1                    |
| 8         | Lemari Besi                                      | Buah          | 17                   |
| 8         | Rak Besi/Metal                                   | Buah          | 4                    |
| 9         | Rak Kayu   | Buah          | 2                    |
| 10        | Filling Besi/Metal                               | Buah          | 22                   |
| 11        | Lemari kayu                                      | Buah          | 3                    |
| 12        | Papan Tulis                                      | Buah          | 1                    |
| 13        | Peta   | Buah          | 5                    |
| 14        | Alat Pemotong Kertas                             | Buah          | 1                    |
| 15        | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)                  | Buah          | 1                    |
| 16        | Papan Data                                       | Buah          | 1                    |
| 17        | Mesin jilid (alat kantor)                        | Buah          | 1                    |
| 18        | Lemari Kayu                                      | Buah          | 1                    |
| 19        | Kursi Besi/Metal                                 | Buah          | 8                    |
| 20        | Meja Rapat                                       | Buah          | 24                   |
| 21        | Kursi Tamu                                       | Buah          | 7                    |
| 22        | Kursi Lipat                                      | Buah          | 98                   |
| 23        | Meja Komputer                                    | Buah          | 3                    |
| 24        | Sofa   | Buah          | 1                    |
| 25        | Sekat Pembatas Ruangan                           | Buah          | 1                    |
| 26        | Lemari Buku                                      | Buah          | 4                    |
| 27        | Kompas Gas                                       | Buah          | 1                    |



| No | Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang       | Satuan | Jumlah Barang |
|----|---|--------|---------------|
| 28 | Tabung Gas                                      | Buah   | 2             |
| 29 | Televisi  | Buah   | 1             |
| 30 | Microphone Table Stand                          | Buah   | 6             |
| 31 | Camera Video                                    | Buah   | 2             |
| 32 | Dispenser                                       | Buah   | 3             |
| 33 | Gorden  | Buah   | 2             |
| 34 | Speaker Aktif                                   | Buah   | 3             |
| 35 | Tabung Pemadam Kebakaran                        | Buah   | 10            |
| 36 | P.C Unit  | Buah   | 43            |
| 37 | Lap Top   | Buah   | 1             |
| 38 | Note Book                                       | Buah   | 17            |
| 39 | Hard Disk                                       | Buah   | 4             |
| 40 | VGA   | Buah   | 2             |
| 41 | Power Suply                                     | Buah   | 1             |
| 42 | Printer   | Buah   | 23            |
| 43 | Plotter   | Buah   | 1             |
| 44 | VGA   | Buah   | 2             |
| 45 | Cartidge  | Buah   | 5             |
| 46 | Software  | Buah   | 1             |
| 47 | Monitor   | Buah   | 1             |
| 48 | Printer   | Buah   | 8             |
| 49 | Scanner   | Buah   | 3             |
| 50 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain           | Buah   | 1             |
| 51 | Unit Power Saving (UPS)                         | Buah   | 10            |
| 52 | Stabilizer Voltage (stavolt)                    | Buah   | 5             |
| 55 | Server  | Buah   | 1             |
| 56 | Router  | Buah   | 1             |
| 57 | Modem   | Buah   | 1             |
| 58 | Meja Kerja Pejabat Eselon II                    | Buah   | 1             |
| 59 | Meja Kerja Pejabat Eselon III                   | Buah   | 2             |
| 60 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                    | Buah   | 2             |
| 61 | Meja Tamu Ruangan Biasa                         | Buah   | 5             |
| 62 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | Buah   | 2             |
| 63 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                  | Buah   | 6             |
| 64 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                   | Buah   | 10            |
| 65 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural              | Buah   | 46            |
| 66 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II  | Buah   | 2             |
| 67 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | Buah   | 4             |
| 68 | Proyektor + Attachment                          | Buah   | 6             |
| 69 | Microphone/Wireless Mic                         | Buah   | 1             |
| 70 | Professional Sound System                       | Buah   | 1             |



| No | Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang | Satuan | Jumlah Barang |
|----|---|--------|---------------|
| 71 | Chairman/Audio Conference                 | Buah   | 1             |
| 72 | Peralatan studio Visual Lain-lain         | Buah   | 1             |
| 73 | Handycam                                  | Buah   | 1             |
| 74 | Camera Electronic                         | Buah   | 3             |
| 75 | Video Monitor                             | Buah   | 4             |
| 76 | Sound System                              | Buah   | 1             |
| 77 | Pesawat Telephone                         | Buah   | 1             |
| 78 | Facsimile                                 | Buah   | 1             |
| 79 | BUKU                                      | Buah   | 662           |

Sumber : Bappeda Tahun 2017.

Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Perkantoran, untuk melaksanakan tugas sudah cukup memadai, Bappelitbangda sudah memiliki gedung sendiri yang representatif.
2. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada dalam kondisi baik dan memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda. Kendaraan dinas/operasional saat ini, sampai dengan tahun 2012 sudah ada 4 unit mobil dan 18 sepeda motor, sehingga cukup memadai untuk mendukung kelancaran mobilitas dan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representatif.
4. Perangkat komputer dan komponen pendukung yang sudah mencukupi jumlahnya untuk peningkatan kapasitas kinerja Bappelitbangda.
5. Program *software* yang ada perlu dikembangkan kapasitasnya untuk proses perencanaan pembangunan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Batu selama periode renstra sebelumnya yaitu tahun 2012 hingga 2017 baik terkait dengan target capaian maupun realisasi anggaran tersaji dalam tabel 2.3 dan 2.4 berikut :





Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD   | Target SPM  | Target IKK | Target Indikator Lain | Target Renstra Bappeda |                            |        |                          |                             | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|---|------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|     |  |   |            |                       | 2013                   | 2014                       | 2015   | 2016                     | 2017                        | 2013              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1   | 2  | 3   | 4          | 5                     | 6                      | 7                          | 8      | 9                        | 10                          | 11                | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 1   | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan digital. (SPM)  | 1 Perda RTRW<br>Belum ada Perwali RTBL<br>0 dokumen |            |                       | 2 Perda RDTRK<br>-     | 1 Perda RDTRK Perwali RTBL | -<br>- | Evaluasi Perda RTRW<br>- | Evaluasi 3 Perda RDTRK<br>- | 0                 | 0    | 0    | 100  | 0    | 0             | 0    | 0    | 100  | 0    |
| 2   | Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan. (SPM)  | 1.777,70 Ha (9% dr luas wilayah Kota Batu, 2,2%)    |            |                       | 2,2%                   | 2,2%                       | 2,2%   | 2,2%                     | 2,2%                        | 2,3%              | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3   | Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusun RTR dan program pemanfaatan ruang. (SPM) | 14 kali   |            |                       | 3x                     | 3x                         | 3x     | 3x                       | 2x                          | 3x                | 3x   | 3x   | 2x   | 2x   | 100%          | 100% | 100% | 80%  | 100% |
| 4   | Terlayannya masyarakat dalam mengurus izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR. (SPM)   | 32 rekomendasi                                      |            |                       | 30                     | 30                         | 30     | 30                       | 30                          | 40                | 40   | 40   | 40   | -    | 133%          | 133% | 133% | 133% | -    |
| 5   | Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja. (SPM)   | 1 pengaduan   |            |                       | -                      | 100%                       | 100%   | 100%                     | 100%                        | -                 | -    | 100% | -    | -    | -             | -    | 100% | -    | -    |
| 6   | Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi   | 0   |            |                       | 0                      | 100%                       | 100%   | 100%                     | 100%                        | -                 | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -    |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD  | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lain | Target Renstra Bappeda |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Capaian |      |      |      |      |
|-----|---|------------|------------|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|     |   |            |            |                       | 2013                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1   | 2   | 3          | 4          | 5                     | 6                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 18   | 19   | 20   |
|     | umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. (Dedicated)                      |            |            |                       |                        |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
| 7   | Tersedianya data/informasi kondisi umum daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)  | 3 dokumen  |            |                       | 3                      | 3    | 4    | 1    | 1    | 3                 | 3    | 4    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8   | Tersedianya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)                          | 3 dokumen  |            |                       | 3                      | 3    | 3    | 3    | 3    | 3                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9   | Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. (Dedicated) |            |            |                       |                        |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|     | Musrenbang forum SKPD.  | 1 kali     |            |                       | 1                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Musrenbang forum kota.  | 1 kali     |            |                       | 1                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Musrenbang RPJMD.   | -          |            |                       | 1                      | -    | -    | -    | -    | 1                 | -    | -    | -    | -    | 100%          | -    | -    | -    | -    |
|     | Musrenbang RPJPD.   | 1 kali     |            |                       | -                      | -    | -    | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    | -    |
| 10  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda. (Dedicated)                         | 1          |            |                       | 1                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 100%          | -    | -    | -    | -    |
| 11  | Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perwali. (Dedicated)                        | 5          |            |                       | 1                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12  | Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan Perwali. (Dedicated)                             | 36         |            |                       | 36                     | -    | -    | -    | -    | 36                | -    | -    | -    | -    | 100%          | -    | -    | -    | -    |
| 13  | Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah   | 36         |            |                       | 36                     | 36   | 36   | 36   | 36   | 36                | 36   | 36   | 36   | 36   | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD   | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lain | Target Renstra Bappeda |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|------------|------------|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|     |  |            |            |                       | 2013                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5                     | 6                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 18   | 19   | 20   |
|     | ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (Dedicated)   |            |            |                       |                        |      |      |      |      |                   |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
| 14  | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran. (Dedicated)  | 5          |            |                       | 5                      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15  | Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. (Dedicated) | 5          |            |                       | 1                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16  | Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD. (Dedicated)                 | 75%        |            |                       | 80%                    | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 80%               | 85%  | 90%  | 95%  | 100% | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17  | Cakupan kerjasama pembangunan.   | 0          |            |                       | 0                      | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 1    | 0    | -             | -    | -    | 100% | -    |
| 18  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.   | 0          |            |                       | 0                      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | -             | -    | -    | -    | -    |
| 19  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.   | 0          |            |                       | 0                      | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | -             | -    | -    | -    | -    |
| 20  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.   | 5          |            |                       | 6                      | 13   | 10   | 4    | 5    | 6                 | 13   | 10   | 4    | 5    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21  | Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.  | 4          |            |                       | 5                      | 5    | 5    | 2    | 4    | 5                 | 5    | 5    | 2    | 4    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22  | Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.  | 3          |            |                       | 3                      | 8    | 3    | 6    | 3    | 3                 | 8    | 3    | 6    | 3    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD   | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lain | Target Renstra Bappeda |      |      |      |      | Realisasi Capaian |      |      |      |      | Rasio Capaian |      |      |      |      |
|-----|--|------------|------------|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
|     |  |            |            |                       | 2013                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013              | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5                     | 6                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12   | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 23  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.                                   | -          |            |                       | -                      | -    | -    | -    | -    | 4                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.  | -          |            |                       | -                      | -    | -    | -    | -    | -                 | 1    | -    | -    | -    | -             | 100% | -    | -    | -    |
| 25  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda.   | 1          |            |                       | 0                      | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                 | 0    | 0    | 0    | 1    | -             | -    | -    | -    | 100% |
| 26  | Tersedianya dokumen RDTRK yang telah ditetapkan dengan Perda.  | 0          |            |                       | 2                      | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | -             | 100% | -    | -    | -    |
| 27  | Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.                              | 70%        |            |                       | 75%                    | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 75%               | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mendampingi dokumen RPJMD.                 | 0          |            |                       | 0                      | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | -             | 100% | -    | -    | -    |
| 29  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mendampingi dokumen RDTRK BWP 1, 2, dan 3. | 0          |            |                       | 2                      | 0    | 1    | 0    | 0    | 2                 | 0    | 1    | 0    | 0    | 100%          | -    | 100% | -    | -    |
| 30  | Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Walikota kepada DPRD melalui sidang paripurna.    | 6          |            |                       | 1                      | 1    | 1    | 1    | 2    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%          | 100% | 100% | 100% | 50%  |

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja.



Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu

| Uraian<br>(disesuaikan dengan kewenangan SKPD)                              | Anggaran      |               |               |               |               | Realisasi Anggaran |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2013               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| 1   | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                  | 8             | 9             | 10            | 11            |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Hasil pajak daerah.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Hasil retribusi daerah.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.                        | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Lain-lain PAD yang sah.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Dana Perimbangan</b>   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Dana alokasi umum.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Dana alokasi khusus.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                                 | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Pendapatan hibah.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Dana darurat.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.        | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Dana penyesuaian dan otonomi khusus.                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.            | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>BELANJA DAERAH</b>   |               |               |               |               |               |                    |               |               |               |               |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b>   |               |               |               |               |               |                    |               |               |               |               |
| - Belanja pegawai.  | 2.544.687.299 | 2.780.130.027 | 2.768.589.511 | 2.959.964.884 | 4.331.549.228 | 2.479.912.522      | 2.487.735.355 | 2.507.359.606 | 2.893.082.504 | 3.923.194.334 |
| - Belanja bunga.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Belanja subsidi.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Belanja hibah.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Belanja bantuan sosial.   | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa. | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| - Belanja tidak terduga.  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Belanja Langsung</b>   |               |               |               |               |               |                    |               |               |               |               |
| - Belanja pegawai.  | 735.925.000   | 643.500.000   | 610.050.000   | 521.950.000   | 4.593.449.228 | 631.775.000        | 459.350.000   | 404.741.250   | 467.520.000   | 4.162.994.334 |
| - Belanja barang dan jasa.  | 1.856.475.500 | 2.521.827.700 | 3.669.628.200 | 3.387.719.291 | 4.964.678.200 | 1.465.917.763      | 1.967.562.311 | 2.789.588.177 | 2.577.910.502 | 2.963.010.989 |
| - Belanja modal.  | 1.768.390.000 | 3.197.757.500 | 1.435.495.000 | 857.250.000   | 343.500.000   | 1.685.687.000      | 3.137.490.000 | 1.088.512.975 | 826.545.000   | 328.075.000   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>   |               |               |               |               |               |                    |               |               |               |               |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -             | -             | -             | -             |



## Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018-2022

| Uraian<br>(d disesuaikan dengan kewenangan<br>SKPD)             | Anggaran |      |      |      |      | Realisasi Anggaran |      |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|
|   | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1   | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7                  | 8    | 9    | 10   | 11   |
| - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun<br>anggaran sebelumnya. | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Pencairan dana cadangan.                                      | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Hasil penjualan kekayaan daerah yang<br>dipisahkan.           | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Penerimaan pinjaman daerah.                                   | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Penerimaan kembali pemberian<br>pinjaman.                     | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Penerimaan piutang daerah.                                    | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                   | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Pembentukan dana cadangan.                                    | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Penyertaan modal (investasi)<br>pemerintah daerah.            | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Pembayaran pokok utang.                                       | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |
| - Pemberian pinjaman daerah.                                    | -        | -    | -    | -    | -    | -                  | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda Kota Batu.



Lanjutan tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu.

| Uraian<br>(disesuaikan dengan kewenangan SKPD)                              | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2013                                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran              | Realisasi |
| 11  | 12                                  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Hasil pajak daerah.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Hasil retribusi daerah.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.                        | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Lain-lain PAD yang sah.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>Dana Perimbangan</b>   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.                                  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Dana alokasi umum.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Dana alokasi khusus.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                                 | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Pendapatan hibah.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Dana darurat.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.        | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Dana penyesuaian dan otonomi khusus.                                      | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.            | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>BELANJA DAERAH</b>   |                                     |      |      |      |      |                       |           |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b>   |                                     |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja pegawai.  | 97%                                 | 89%  | 91%  | 98%  | 91%  | 20%                   | 94%       |
| - Belanja bunga.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Belanja subsidi.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Belanja hibah.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Belanja bantuan sosial.   | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa. | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Belanja tidak terduga.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>Belanja Langsung</b>   |                                     |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja pegawai.  | 86                                  | 71   | 66   | 90   | 91   | 20%                   | 93%       |
| - Belanja barang dan jasa.  | 79                                  | 78   | 76   | 76   | 60   | 30%                   | 95%       |
| - Belanja modal.  | 95                                  | 98   | 76   | 96   | 96   | 10%                   | 95%       |
| <b>PEMBIAYAAN</b>   |                                     |      |      |      |      |                       |           |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.                | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Pencairan dana cadangan.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| Uraian<br>(d disesuaikan dengan kewenangan SKPD)   | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|  | 2013                                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran              | Realisasi |
| 11   | 12                                  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        |
| - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Penerimaan pinjaman daerah.                      | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Penerimaan kembali pemberian pinjaman.           | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Penerimaan piutang daerah.                       | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                      | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Pembentukan dana cadangan.                       | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.  | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Pembayaran pokok utang.                          | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |
| - Pemberian pinjaman daerah.                       | -                                   | -    | -    | -    | -    | -                     | -         |





## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### 2.4.1. Hasil analisis terhadap renstra K/L dan provinsi

Analisis terhadap renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra Bappelitbangda Kota Batu terhadap sasaran Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Hasil review ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappelitbangda yang akan ditangani pada renstra Bappelitbangda Kota Batu.

Tabel 2.5.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Batu terhadap Sasaran Renstra Bappeprov Jawa Timur dan Renstra Bappenas

| No  | Indikator Kinerja Utama  | Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Batu           | Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur                            | Sasaran pada Renstra Bappenas   |
|-----|--|---|---|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1   | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan digital. (SPM)  | 1 Perda RTRW<br>Belum ada Perwali RTBL<br>0 dokumen | Tersedianya data dan linformasi pendukung perencanaan pembangunan.          | Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. |
| 2   | Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)   | 1.777,70 Ha (9% dr luas wilayah Kota Batu)          | Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana.                              | Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap RPJMN 2010-2014   |
| 3   | Terlaksananya penjangingan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusun RTR dan program pemanfaatan ruang. (SPM) | 14 kali   | Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan.     | Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.   |
| 4   | Terlayaninya masyarakat dalam mengurus izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR. (SPM)  | 32 rekomendasi                                      | Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan | Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus)  |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No  | Indikator Kinerja Utama   | Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Batu | Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur                                      | Sasaran pada Renstra Beppenas |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                                       | (4)   | (5)                           |
|     |   |   |   | dari Pemerintah/ presiden.    |
| 5   | Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja. (SPM)                                | 1 pengaduan                               | Tersedianya sistem pelaporan hasil pembangunan.                                       | -                             |
| 6   | Persentase jumlah SKPD yang mengembangkan data/informasi kondisi umum daerah dan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara valid dan terkini. (Dedicated) | 0   | Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia.  | -                             |
| 7   | Tersedianya data/informasi kondisi umum daerah yang valid dan terkini. (Dedicated)  | 3 dokumen                                 | Tersedianya pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan.                     | -                             |
| 8   | Tersedianya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini. Dedicated)   | 3 dokumen                                 | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan keuangan.                                  | -                             |
| 9   | Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam proses penyusunan perencanaan daerah. (Dedicated)   |   | Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan.                                     | -                             |
|     | Musrenbang forum SKPD.  | 1 kali                                    |   |                               |
|     | Musrenbang formum kota.   | 1 kali                                    |   |                               |
|     | Musrenbang RPJMD.   | 0   |   |                               |
|     | Musrenbang RPJPD.   | 1 kali                                    |   |                               |
| 10  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perda. (Dedicated)   | 1   | Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan | -                             |
| 11  | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang berkualitas, yang ditetapkan dengan Perwali. (Dedicated)  | 5   | -   | -                             |
| 12  | Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan Perwali. (Dedicated)   | 36  | -   | -                             |
| 13  | Tersedianya dokumen Renja SKPD yang berkualitas, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (Dedicated)  | 35  | -   | -                             |
| 14  | Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran. (Dedicated)   | 5   | -   | -                             |
| 15  | Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan proyeksi penganggaran pembangunan sesuai  | 5   | -   | -                             |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No  | Indikator Kinerja Utama  | Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Batu | Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur | Sasaran pada Renstra Beppenas |
|-----|--|---|--|-------------------------------|
| (1) | (2)  | (3)                                       | (4)  | (5)                           |
|     | peraturan yang berlaku. (Dedicated)  |   |  |                               |
| 16  | Tingkat kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan dengan tugas dan fungsi di dalam masing-masing SKPD. (Dedicated) | 75%                                       | -  | -                             |
| 17  | Cakupan kerjasama pembangunan.   | 0   | -  | -                             |
| 18  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.   | 0   | -  | -                             |
| 19  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.   | 0   | -  | -                             |
| 20  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.   | 5   | -  | -                             |
| 21  | Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.  | 4   | -  | -                             |
| 22  | Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.  | 3   | -  | -                             |
| 23  | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.   | -   | -  | -                             |
| 24  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.  | -   | -  | -                             |
| 25  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda.   | 1   | -  | -                             |
| 26  | Tersedianya dokumen RDTRK yang telah ditetapkan dengan Perda.  | 0   | -  | -                             |
| 27  | Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD.  | 70%                                       | -  | -                             |
| 28  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mendampingi dokumen RPJMD.   | 0   | -  | -                             |
| 29  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mendampingi dokumen RDTRK BWP 1, 2, dan 3.                               | 0   | -  | -                             |
| 30  | Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Walikota kepada DPRD melalui sidang paripurna.                                  | 6   | -  | -                             |

Sumber : Hasil Analisis terhadap Renstra Bappelitbangda Kota Batu, Bappeprov Jawa Timur, dan Bappenas.



#### 2.4.2. Hasil telaah terhadap RTRW

Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappelitbangda. Hasil analisis yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan arah (geografis) dalam pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Tabel 2.6.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Batu

| No. | Rencana Struktur Ruang   | Struktur Ruang Saat Ini   | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda  |
|-----|--|---|--|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   |
| 1.  | Pusat pelayanan kegiatan kota.<br>a. Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa<br>b. Pusat kegiatan sektor perumahan.<br>1) Perumahan pusat kota<br>2) Perumahan real estate dan perumahan wisata<br>3) Perumahan agropolis<br>c. Pusat kegiatan sektor perkantoran.<br>1) Perkantoran pemerintahan.<br>2) Perkantoran swasta | Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa .<br>a. Pasar Induk Kota Batu (Modern-Tradisional) di Jalan Kartini, Kel. Temas<br>b. Pasar sentra di Desa Junrejo<br>c. Ruang bagi kegiatan informal untuk PKL di Jalan Sudiro (Alun-Alun Kota Batu)<br><br>Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum.<br>a. Pusat pendidikan gratis di | Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa .<br>1) Pengembangan pusat perbelanjaan modern dan grosir<br>2) Penyediaan ruang bagi kegiatan informal<br>3) Pasar Agribisnis<br>4) Pengembangan pasar desa agropolitan.<br><br>Pusat kegiatan sektor perkantoran yaitu pembangunan block office |  | Jalan Kartini, Jalan Diponegoro hingga Jalan Gajamada<br><br>PKL bunga di Sidomulyo, PKL Buang di Beji<br><br>Desa Giripurno<br><br>Desa Punten, Desa Tulungrejo dan Desa Junrejo<br><br>Jalan P. Sudirman, Kelurahan Ngaglik |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Struktur Ruang  | Struktur Ruang Saat Ini   | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda            |
|-----|---|---|--|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   |
|     | d. Pusat kegiatan sektor pariwisata.<br>1) Pariwisata buatan.<br>2) Pariwisata alam.<br>3) Pariwisata budaya..<br>e. Pusat kegiatan sektor industri.<br>1) Industri rumah tangga/kecil.<br>2) Industri ringan.<br>f. Pusat sentra produksi pertanian dan pengembangan agropolitan.<br>g. Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum.<br>1) Pelayanan pendidikan.<br>2) Pelayanan Kesehatan.<br>3) Rekreasi dan olahraga.<br>4) Pelayanan bina sosial.<br>5) Pelayanan peribadatan.<br>6) Pelayanan persampahan<br>7) Pelayanan komunikasi. | Desa Bumiaji<br>b. Stadion dan lapangan luar di Desa Pesanggrahan<br>c. Ruang publik (plaza) dan taman di Desa Pesanggrahan | Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum.<br>1) Pengembangan kawasan rumah sakit  |  | Desa Oro-oro Ombo dan Desa Bumiaji                      |
|     |   |   | 2) Pengembangan fasilitas bina sosial di Kota Batu meliputi gedung pertemuan lingkungan dan kecamatan, balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, lembaga sosial/organisasi masyarakat |  | Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji |
|     |   |   | 3) Gedung olahraga   |  | Kelurahan Temas   |
|     |   |   | 4) Gedung kesenian dan teater  |  | Desa Oro-oro ombo                                       |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Struktur Ruang  | Struktur Ruang Saat Ini  | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|---|--|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 2.  | <p>Sistem jaringan prasarana kota.</p> <p>a. Sistem jaringan transportasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan jaringan jalan (jalan kolektor sekunder, jalan lokal/jalur rute wisata)</li> <li>2) Rencana pengembangan terminal dan halte (jalur angkutan dan terminal penumpang).</li> </ol> <p>b. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem jaringan sumberdaya air regional.</li> <li>2) Wilayah sungai di wilayah Kota Batu.</li> <li>3) Sistem jaringan irigasi.</li> <li>4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih.</li> <li>5) Pengendalian bajir di wilayah Kota Batu.</li> </ol> <p>c. Sistem jaringan energi dan kelistrikan</p> <p>d. Sistem jaringan telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem kabel.</li> <li>2) Sistem nirkabel.</li> <li>3) Sistem satelit.</li> </ol> | <p>Sistem jaringan transportasi.</p> <p>a. Jaringan jalan umum yaitu jalan tembus antar Kecamatan/Desa merupakan jalan lokal sekunder di Desa Temas – Desa Bumiaji.</p> <p>b. Jalur wisata yaitu festival road/ jalur festival wisata di Oro-oro Ombo pesanggrahan – Alun-alun kota.</p> | <p>Sistem jaringan transportasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan jaringan jalan umum.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pengembangan jalur wisata</li> </ol> |  | <p>Ruas Karanglo – Batu, (Jalan Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Pattimura, Jalan Gajamada, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Turnojoyo, Jalan Songgoriti).</p> <p>ruas Dau - Pendem - Junrejo –Tlengkung - Oro-oro Ombo –Pesanggrahan ruas Karangploso – Giripurno –Bumiaji – Sidomulyo. Ruas Pacet - Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo – Sisir. Semua jalan kelurahan dan desa yang terdapat di Wilayah Kota Batu. Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Tlengkung, Desa Torongrejo, Desa Bumiaji dengan pusat kegiatan agrobisnis di Desa Giripurno.</p> <hr/> <p>Terminal wisata – BNS (panderman) – Jatim Park – Alun-alun – Songgoriti – Sidomulyo Selekt. Bulukerto-</p> |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Struktur Ruang   | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan              | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|--|-------------------------|--|--|--|
| 1   | 2  | 3                       | 4  | 5  | 6  |
|     | <p>e. Sistem jaringan persampahan, sanitasi, dan drainase.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem pewadahan sampah</li> <li>2) Sistem pengumpulan sampah</li> <li>3) Sistem pemindahan sampah</li> <li>4) Sistem pengangkutan sampah</li> <li>5) Sistem pembuangan akhir sampah.</li> <li>6) Drainase primer</li> <li>7) Drainase sekunder</li> <li>8) Drainase tersier</li> </ol> <p>f. Sistem jaringan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Penyediaan Air Minum Kota</li> <li>2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota</li> </ol> |                         | <p>3) Pengembangan jalur angkutan.</p> <p>4) Pengembangan sarana transportasi.</p> |  | <p>Bumiaji. Desa Bumiaji, dan Desa Songgokerto Tulungrejo, Pesanggrahan</p> <p>Batu – Oro-oro Ombo – Tlengkung – Junrejo – Landungsari. Batu – Bumiaji – Pandanrejo – Giripurno. Giripurno – Torongrejo – Beji – Mojorejo – Dadaprejo – Landungsari; Sumber Brantas – Tulungrejo - Punten – Sidomulyo – Bumiaji – Giripurno. Songgokerto – Sumberejo – Sidomulyo – Giripurno Temas – Ngaglik – Sisir – Bumiaji – Giripurno</p> <p>Terminal tipe B Giripurno. Desa Tulungrejo, Desa Punten, Songgoriti, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo dan terminal wisata di Desa Temas, Desa Oro-oro ombo. Desa Oro-oro Ombo kawasan alun-alun Kota Batu yakni Jalan Diponegoro, hingga Jalan Gajamada, Jalan Kartika.</p> |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan                                 | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                      | 3                       | 4   | 5  | 6  |
|     |                        |                         | Sistem jaringan sumber daya air.<br>1) pengembangan saluran irigasi dengan saluran prime dan sekunder |  | Sistem jaringan irigasi bersumber dari Sungai Brantas, Kali Ampo, Kali Sumpil  |
|     |                        |                         | 2) pengembangan dam pengendali banjir   |  | Sungai Brantas dan anak-anak sungai Brantas yang terdiri dari Kali Braholo, Kali Ampo, Kali Sumpil, Kali Lanang, Kali Mewek, dan Kali Brugan   |
|     |                        |                         | 3) pengelolaan mata air   |  | Sumber Metro, Sumber Kasinan, Prambanan, Torong Sisir, Gedang Klutuk Tenggulun, Genengan, Torongdadap, Watugudik, Torong Belok, Oro-oro ombo, Watu Gede, Torong dadap serta Torong Belok |
|     |                        |                         | Sistem jaringan telekomunikasi.<br>1) Pengembangan jaringan telepon                                   |  | Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu   |





Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan                                   | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                      | 3                       | 4   | 5  | 6  |
|     |                        |                         | 2) Pengembangan tower bersama di Desa Oro-oro ombo dan Desa Tlengkung                                   |  | Gunung Panderman Desa Oro-oro Ombo Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tlengkung dan kawasan Gunung Pucung Desa Tulungrejo. |
|     |                        |                         | 3) Rencana pengembangan stasiun pemancar televisi   |  | Sekitar alun-alun, oro-oro ombo songgoriti, sekitar stadion, kawasan perkantoran                                   |
|     |                        |                         | 4) Penambahan titik pelayanan akses internet untuk umum (hot spot)                                      |  |  |
|     |                        |                         | Sistem jaringan persampahan, sanitasi, dan drainase.<br>1) Pengembangan jaringan penanganan persampahan |  | Setiap kecamatan   |
|     |                        |                         | 2) Sistem pembuangan air hujan (drainase)   |  | Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan di Desa Giripurno yakni di Sebrang Bendo  |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1   | 2                      | 3                       | 4  | 5  | 6  |
|     |                        |                         | <p>Sistem jaringan lainnya.<br/>Sistem penyediaan air minum kota</p> <p>1) Pengembangan sistem gravitasi dalam penyedia air minum dengan memanfaatkan mata air</p> |  | <p>Mata air Darmi melayani Desa Oro– oro Ombo, Ngaglik dan Temas; Mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas; Mata air Gemulo melayani 3 desa : Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejodan Desa Torongrejo serta melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo; Mata air Torong Belok melayani Desa Songgokerto dan Pesanggrahan; Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill; Mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo, Sabtean dan Jl. Panglima Sudirman; Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan</p> |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda   |
|-----|------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1   | 2                      | 3                       | 4  | 5  | 6  |
|     |                        |                         | 2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). |  | Desa Tlengkung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Sumbergondo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas. |

Sumber : Hasil Analisis terhadap RTRW Kota Batu.



Tabel 2.7.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Batu

| No. | Rencana Pola Ruang   | Pola Ruang Saat Ini   | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD     | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD  |
|-----|--|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
| 1   | <p>Kawasan lindung.</p> <p>a. Kawasan hutan lindung</p> <p>b. Kawasan resapan air</p> <p>c. Kawasan perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempadan Sungai</li> <li>• Kawasan Sekitar Mata Air</li> </ul> <p>d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH Publik</li> <li>• RTH Privat</li> </ul> <p>e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahura R. Soeryo</li> <li>• Cagar Budaya Candi Supo</li> <li>• Kawasan Taman Wisata Alam</li> <li>• Kawasan Rawan Bencana Alam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan lindung</li> <li>- Perubahan luas kawasan resapan air</li> <li>- Perubahan luas sempadan sungai dan mata air</li> <li>- Perubahan luas ruang terbuka hijau</li> </ul> | <p>Kawasan hutan lindung.</p> <p>1) Konservasi hutan lindung melalui perencanaan rehabilitasi lahan kritis yang mengalami alih fungsi</p> <p>2) Reboisasi untuk kawasan hutan lindung</p> <p>3) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</p> <p>Kawasan resapan air.</p> <p>1) Pengelolaan wilayah resapan /catchment area agar tidak dijadikan lahan terbangun</p> <p>2) Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap aktifitas budidaya di lahan konservasi sempadan sungai, dan mata air</p> | <p>Pengendalian pola ruang terhadap perubahan kawasan lindung</p> | <p>Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo</p> <p>Gunung Panderman, Pusung Punuk dan Bokong</p> <p>Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo</p> <p>Iereng G. Arjuno, G. Kembar, G Pusungkutu, G. Welirang, G Anjasmoro, G. Rawung, G.Preteng G.Kerumbung, G.Banyak/ Kitiran, G.Srandil, G. Panderman, G. Bokong dan G. Punuksapi</p> <p>-</p> |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD                             |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|---|
| 1   | 2                  | 3                   | 4  | 5   | 6   |
|     |                    |                     | Kawasan perlindungan setempat.<br>Konservasi Sempadan sungai.<br>1) Pelestarian sepanjang sungai/ sempadan sungai<br>2) Pelestarian konservasi sempadan sungai dan hulu Sungai Brantas<br>3) Mempertahankan kelestarian kawasan sempadan sungai<br>4) Menciptakan kawasan rekreatif dengan memanfaatkan sempadan sungai<br>5) Pengawasan , pemantauan dan pengendalian kawasan budidaya di sekitar aliran sungai<br>6) Penghijauan sempadan sungai |   |   |
|     |                    |                     | Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.<br>1) Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan yang berfungsi sebagai RTH kota<br>2) Pengembangan taman kota /Alun-Alun Kota Batu<br>3) Pengendalian pemanfaatan di kawasan ruang terbuka hijau  |   | Sepanjang jalan, sungai<br><br>Kelurahan Temas<br><br>Seluruh wilayah |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan      | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD  |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|--|
| 1   | 2                  | 3                   | 4  | 5   | 6  |
|     |                    |                     | Penanganan sekitar mata air<br>1) Rehabilitasi hutan sekitar mata air      |   | 111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo  |
|     |                    |                     | 2) Perbaiki fisik sekitar mata air   |   |  |
|     |                    |                     | 3) Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air bersih |   | <input type="checkbox"/> mata air Darmi<br><input type="checkbox"/> mata Air Banyuning<br><input type="checkbox"/> Mata air Gemulo<br><input type="checkbox"/> Gemulo I<br><input type="checkbox"/> Gemulo II<br><input type="checkbox"/> Gemulo III penangkapan air<br><input type="checkbox"/> Mata air Torong<br><input type="checkbox"/> Mata air Kasinan<br><input type="checkbox"/> Mata air Ngesong 1 dan 2<br><input type="checkbox"/> Sumber Ngesong 1<br><input type="checkbox"/> Sumber Ngesong 2<br><input type="checkbox"/> Sumber Cemoro Kandang |
|     |                    |                     | Kawasan suaka alam dan cagar budaya.<br>1) Konservasi Taman hutan raya     |   | Pelestarian KPH Malang (ex hutan lindung) Pelestarian Balai KSDA Jatim II (Ex cagar alam)  |
|     |                    |                     | 2) Konservasi cagar budaya - Rehabilitasi kerusakan                        |   | candi candi Supo songgoriti sebagai benda cagar budaya   |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD  |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|--|
| 1   | 2                  | 3                   | 4  | 5   | 6  |
|     |                    |                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Konservasi bangunan bersejarah di kota dan tempat wisata</li></ul>   |   | Kota Batu<br>Pusat kota, songgoriti, selecta   |
|     |                    |                     | <p>3) Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perancangan ulang Arboretum</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan elemen-elemen pendukung (jalan setapak, air bersih, fasilitas mushola, perkemahan, rumah peristirahatan, areal parkir dll )</li><li>- pengembangan arboretum dengan menciptakan kawasan rekreasi menarik dan sarat dengan muatan ilmiah yang menonjolkan elemen -elemen pendidikan dan penelitian, terutama pendidikan lingkungan dan pelestarian air.</li></ul> |   | Desa Sumber Brantas, TAHURA R. Soeryo yang berada di lingkungan obyek wisata Sumber air panas Cangar<br>TAHURA R. Soeryo yang berada di lingkungan obyek wisata Sumber air panas Cangar<br><br>Desa Sumber Brantas |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan                         | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|-----|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1   | 2                  | 3                   | 4   | 5   | 6   |
|     |                    |                     | Kawasan rawan bencana alam.   |   |   |
|     |                    |                     | 1) Identifikasi terhadap kawasan rawan bencana erosi dan banjir                               |   | Seluruh wilayah                           |
|     |                    |                     | 2) Penetapan kawasan rawan banjir di area sempadan sungai                                     |   | Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo |
|     |                    |                     | 3) Penetapan kawasan rawan bencana (erosi).   |   | Seluruh wilayah                           |
|     |                    |                     | 4) Pencegahan daerah rawan erosi  |   | Seluruh wilayah lereng gunung             |
|     |                    |                     | 5) Pemantauan daerah rawan erosi terhadap pengembangan ruang terbangun                        |   |   |
|     |                    |                     | 6) Penghijauan lahan gundul pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan longsor  |   |   |
|     |                    |                     | 7) Pemantapan fungsi kawasan sebagai kawasan hutan lindung, dan kawasan perlindungan terbatas |   | Seluruh wilayah lereng gunung             |





**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Pola Ruang   | Pola Ruang Saat Ini                 | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD   |
|-----|--|-------------------------------------|--|---|---|
| 1   | 2  | 3                                   | 4  | 5   | 6   |
|     |  |                                     | 8) Perencanaan penanganan mitigasi bencana akibat tanah tanah amblas   |   | Kecamatan Batu  |
|     |  |                                     | 9) Penyiapan jalur evakuasi bencana  |   | Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana   |
|     |  |                                     | 10) Pembangunan ruang evakuasi bencana   |   | Alun-alun Kota Batu, Stadion Brantas maupun Gedung olahraga   |
| 2   | Kawasan budidaya.<br>a. Kawasan Hutan Produksi .<br>b. Kawasan Perumahan<br>c. Kawasan Perdagangan Dan Jasa<br>d. Kawasan Perkantoran<br>e. Industri<br>f. Kawasan Pariwisata<br>g. Kawasan Pertanian<br>h. Perikanan<br>i. Ruang Terbuka Non Hijau<br>j. Ruang Jalur Evakuasi Bencana<br>k. Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal<br>l. Kawasan Pertanian<br>m. Pelayanan Umum; serta | - Perubahan luasan kawasan budidaya | Kawasan Hutan Produksi .<br>1) Pemantauan dan pengendalian hasil hutan dalam menjaga kelestarian hutan Produksi<br><br>2) Pengolahan hasil hutan produksi secara berkelanjutan | Instrument Pengendalian perubahan kawasan budidaya            | Gunung Wirang, Gunung Kembar, Gunung Tunggangan, Gunung Gede, Gunung Jeruk, Gunung Kerumbung, Gunung Pratang, Gunung Punuksapi, Gunung Bokong, Gunung Panderman, Gunung Ukir, dan sempadan sungai di Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo<br><br>Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Songgokerto, dan Desa Oro-oro Ombo |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No.   | Rencana Pola Ruang              | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan                  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD                                       |
|---|---------------------------------|---------------------|--|---|---|
| 1   | 2                               | 3                   | 4  | 5   | 6   |
| n.  | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |                     | 3) Pengembangan agroforestry dan ecotourism  |   | Desa Oro-oro Ombo, Desa Tlengkung, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto       |
|   |                                 |                     | Kawasan Perumahan .  |   |   |
|   |                                 |                     | 1) Pengembangan perumahan.   |   | Desa Oro-oro ombo, Desa Tlekung   |
|   |                                 |                     | 2) Pengembangan real estate  |   | Kec .Junrejo  |
|   |                                 |                     | 3) Pengembagan pemukiman wisata dan permukiman agropolitan                             |   | Kecamatan Bumiaji   |
|   |                                 |                     | 4) Pengembangan kawasan perumahan PNS dan Perumahan terjangkau                         |   | Desa Oro-oro Ombo   |
|   |                                 |                     | 5) Pengembangan dan penataan perumahan wisata ( perumahan agropolis dan kawasan villa) |   | Desa Oro-oro Ombo   |
|   |                                 |                     | Industri.  |   |   |
|   |                                 |                     | 1) Pengembangan Industri rumah tangga dan kerajinan                                    |   | Kecamatan Bumiaji dan industri kerajinan yang terdapat di Junrejo dan Dadaprejo |
|   |                                 |                     | 2) Identifikasi sentra lokasi industri kecil-menengah dan homestay                     |   |   |
| 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri |                                 |                     |  |   |   |
| 4) Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian             |                                 | Giripurno           |  |   |   |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD   |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|---|
| 1   | 2                  | 3                   | 4  | 5   | 6   |
|     |                    |                     | 5) Pengembangan industri pengolahan hasil perkebuna pada kawasan agropolitan .                               |   | Desa Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Bumiaji.  |
|     |                    |                     | 6) Pengembangan industri kerajinan kayu dan marmar yang dikembangkan   |   | Desa Dadaprejo dan Mojorejo Kecamatan Junrejo.  |
|     |                    |                     | Kawasan Pariwisata.<br>1) Pengembangan lokasi obyek wisata kota  |   | Oro-oro Ombo  |
|     |                    |                     | 2) Peningkatan prasarana wisata berupa penginapan dan Akomodasi  |   | -   |
|     |                    |                     | 3) Wisata living with people   |   | Bumiaji   |
|     |                    |                     | 4) Wisata adventure  |   | Bumiaji dan gunung banyak   |
|     |                    |                     | 5) Pengembangan botanical garden, Great nature of batu, Ecotourism, Agroturism, memorial resort, sportuorism |   | Tulungrejo dan Sumber Brantas   |
|     |                    |                     | 6) Kegiatan wisata paralayang  |   | Gunung Banyak   |
|     |                    |                     | Kawasan Pertanian<br>1) Pengembangan komoditas hortikultura  |   | Desa Tulungrejo, Gunungsari, Punten dan Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, serta Desa Oro-oro Ombo, Pesanggrahan, serta |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD   |
|-----|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1   | 2                  | 3                   | 4   | 5   | 6   |
|     |                    |                     |   |   | Songgokerto di Kecamatan Batu, serta Desa Junrejo Kecamatan Junrejo                   |
|     |                    |                     | 2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.                    |   | -   |
|     |                    |                     | 3) Pengembangan Sentra tanaman hias.                                  |   | Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Punten, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji.    |
|     |                    |                     | 4) Pengembangan perkebunan apel memusat.                              |   | Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Tlengkung Kecamatan Junrejo.               |
|     |                    |                     | 5) Pengembangan perkebunan jeruk.                                     |   | Tlengkung dan Oro-oro Ombo.   |
|     |                    |                     | 6) Pengembangan Perkebunan alpukat.                                   |   | Tlengkung dan Desa Torongrejo   |
|     |                    |                     | 7) Pengadaan pusat penelitian.  |   | Bumiaji dan Tlengkung.  |
|     |                    |                     | 8) Identifikasi dan pemeliharaan tanaman pangan.                      |   | Pendem  |
|     |                    |                     | 9) Budidaya kegiatan peternakan sapi perah.                           |   | Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Pesanggrahan, serta di Kecamatan Bumiaji Desa Gunungsari. |
|     |                    |                     | 10) Pembangunan kandang sapi kolektif.                                |   | Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan.   |
|     |                    |                     | 11) Pengembangan industri   |   | Desa Oro-oro Ombo, dan  |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan  | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD                   |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|---|
| 1   | 2                  | 3                   | 4  | 5   | 6   |
|     |                    |                     | pengolahan susu ternak.  |   | Desa Pesanggrahan,<br>Kecamatan Bumiaji<br>Desa Gunungsari. |
|     |                    |                     | 12) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.   |   | Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Batu.           |
|     |                    |                     | 13) Pembentukan satuan pengembangan awasan pertanian dan sub kegiatan sektor pertanian.  |   | -   |
|     |                    |                     | 14) Pengembangan pasar agropolitan.  |   | Giripurno.  |
|     |                    |                     | 15) Pengembangan desa agropolis ini didukung dengan kegiatan pasar agropolitan, balai penelitian serta disinergikan dengan kegiatan wisata yang akan dikembangkan di kota Batu terutama wisata living with people. |   | -   |

Sumber : Hasil Analisis terhadap RTRW Kota Batu.



### 2.4.3. Hasil telaah terhadap KLHS

Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kota Batu. Dari hasil analisis yang diperoleh, jika ternyata ada program dan kegiatan pelayanan Bappeda yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut akan dilakukan revisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 2.8.

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Batu

| No. | Aspek Kajian  | Ringkasan KLHS  | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD  | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD   |
|-----|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1   | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Kemampuan ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas/kegiatan sehingga dapat ditentukan kegiatan yang masih bisa ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau dengan kata lain untuk memastikan suatu kawasan lingkungan masih mampu mendukung kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lain | a. Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa<br>b. Rencana pengembangan sektor perkantoran<br>c. Rencana pengembangan sektor perumahan<br>d. Rencana pengembangan fasilitas pelayan umum<br>e. Rencana pengembangan sektor pariwisata<br>f. Rencana pengembangan sektor industri<br>g. Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi | Rencana pengembangan kegiatan harus tetap memperhatikan kawasan yang digunakan untuk daerah resapan air, kawasan lindung (tidak adanya alih fungsi lahan) dan tidak menimbulkan pencemaran air didalam pelaksanaannya. |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Aspek Kajian  | Ringkasan KLHS  | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD  | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD  |
|-----|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 2   | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Prediksi dari dampak suatu kebijakan, rencana atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar.                            | a. Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa<br>b. Rencana pengembangan sektor perkantoran<br>c. Rencana pengembangan sektor perumahan<br>d. Rencana pengembangan fasilitas pelayan umum<br>e. Rencana pengembangan sektor pariwisata<br>f. Rencana pengembangan sektor industri<br>g. Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi | a. Untuk rencana pengembangan kegiatan harus menganalisis tingkat kelerengan/kemiringan suatu lahan (tanah) karena tingkat kemiringan yang tinggi akan kurang ekonomis dimana untuk melakukan <i>cut and fill</i> memerlukan biaya yang cukup besar dan risiko erosi yang tinggi<br>b. Rencana pengembangan harus mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya penurunan kualitas lingkungan yaitu polusi tanah, air dan udara akibat limbah kegiatan . |
| 3   | Kinerja layanan/jasa ekosistem                        | Kemampuan untuk mencapai suatu hasil melalui fungsi ekosistem/layanan meliputi layanan fungsional, layanan regulasi, layanan pendukung kehidupan.   | Rencana pola ruang kawasan budidaya  | Rencana pengembangan perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan produktif pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan. Dengan adanya regulasi yang tepat maka dapat meminimalisir kawasan terbangun sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada pengendalian banjir maupun erosi.  |
| 4   | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam                | Pendayagunaan sampai tingkat optimal dalam pemanfaatan sumberdaya alam di mana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam dapat tetap dilestarikan. | Rencana pengembangan sektor pariwisata   | Untuk pengembangan kawasan wisata yang mengarah pada pembukaan lahan baru guna membangun obyek wisata baru perlu dikaji secara mendalam terkait dengan sumber daya alam (daerah resapan air, polusi tanah, udara dan daya dukung lingkungan lainnya) sehingga obyek wisata yang telah ada dapat dimaksimalkan sarana, prasarana serta pelayanannya.   |
| 5   | Tingkat kerentanan dan kapasitas                      | Kondisi lingkungan yang tidak dapat diduga dari kemungkinan dampak perubahan iklim  | Rencana pengembangan sektor perumahan  | Pembangunan perumahan, real estate maupun hotel harus ada regulasi yang jelas dan pasti karena membuka lahan  |



Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022

| No. | Aspek Kajian  | Ringkasan KLHS   | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD   | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD  |
|-----|---|--|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   |
|     | adaptasi terhadap perubahan iklim                   |  |   | baru dengan cara menebang hutan dapat berakibat pada perubahan iklim global dan perubahan iklim yang ekstrim yang berdampak pada musim kering berkepanjangan, musim hujan yang semakin tinggi, hujan angin ataupun badai. |
| 6   | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | Kondisi lingkungan yang cenderung tetap dan dapat diukur dengan indeks keanekaragaman hayati | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa</li><li>b. Rencana pengembangan sektor perkantoran</li><li>c. Rencana pengembangan sektor perumahan</li><li>d. Rencana pengembangan fasilitas pelayan umum</li><li>e. Rencana pengembangan sektor pariwisata</li><li>f. Rencana pengembangan sektor industri</li><li>g. Rencana kawasan strategis</li><li>h. Rencana pola ruang kawasan budidaya</li></ul> | Pengelolaan rencana pengembangan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak berakibat berkurangnya hutan lindung yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati.                                |

Sumber : Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Batu.





## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

---

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda**

Penyusunan renstra Bappelitbangda Kota Batu didasarkan pada berbagai macam isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Bappelitbangda Kota Batu, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Isu strategis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD. Apabila isu strategis tidak diantisipasi, akan dapat menimbulkan kerugian atau hambatan bagi kinerja Bappeda, dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Bappeda. Namun sebaliknya apabila isu strategis diantisipasi, maka Bappeda dapat menekan faktor penghambat dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan Bappelitbangda, analisis renstra Bappelitbangda, analisis renstra Bappeprov Jawa Timur, hasil analisis RTRW Kota Batu, dan hasil analisis KLHS Kota Batu. Identifikasi disajikan dalam tabel 3.1. berikut :



Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kota Batu

| No  | Masalah Pokok  | Masalah  | Akar Masalah  |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   |
| 1.  | Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan belum Optimal | 1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum dilaksanakan secara berkualitas dan selaras | 1. Kurangnya fasilitator yang berkualitas dalam pelaksanaan musrenbang desa/kec.<br>2. Terlalu kuatnya intervensi hak budget DPRD<br>3. Terjadinya dominasi kebijakan kepala daerah atas kondisi masyarakat<br>4. Terjadinya pengarusutamaan program-program OPD<br>5. Indikator target RPJMD/Renstra terhadap RKPD/Renja kurang SMART<br>6. OPD kurang berperan aktif dalam monev perencanaan pembangunan<br>7. Keterbatasan kemampuan tenaga perencan OPD |
|     |  | 2. Hasil Studi/Kajian/Penelitian belum dapat dimanfaatkan sebagai penyempurna perencanaan pembangunan daerah   | 1. Belum optimalnya fungsi dan peranan bidang kelitbang<br>2. Belum tersusunnya Studi/Kajian/Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan  |



### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu telah memiliki arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Arah pembangunan yang terwujud dalam visi, misi, dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022.

Bappelitbangda sebagai salah satu Satuan Kerja Pelaksana Daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sesuai arah pembangunan tersebut. Untuk itu, Bappelitbangda menelaah berbagai faktor yang menghambat dan mendukung kinerja Bappelitbangda terhadap visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Batu.

Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung kinerja Bappelitbangda terhadap visi, misi, dan program menjadi salah satu elemen dalam isu-isu strategis pelayanan Bappelitbangda. Sehingga isu strategis Bappelitbangda tidak hanya tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan Bappeda, tetapi juga berdasarkan pengelolaan terhadap faktor penghambat dan pendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batu. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.3. berikut :



Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Setra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahterah |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| No.  | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih   | Permasalahan Bappelitbangda  | Faktor   |  |
|  |   |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Misi 5<br>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Profesional . | 1. Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br><br>2. Kelembagaan<br><br>3. Kualitas Dokumen Perencanaan | 1. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kompetensi.<br><br>2. Managemen sistem kelembagaan Bappelitbangda masih belum optimal<br><br>3. Belum diacunya dokumen rencana pembangunan daerah secara konsisten | 1. Tingkat Pendidikan formal pegawai di Bappelitbangda rata-rata telah cukup.<br><br>2. Tersedianya dasar aturan dan struktur organisasi di Bappelitbangda |



### **3.3. Telahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeprov**

Identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda juga digali dari keterkaitan dengan sasaran jangka menengah Renstra Bappenas (yang telah diuraikan pada tabel 2.5. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L). Yang dimaksud permasalahan pelayanan adalah adanya kesenjangan capaian renstra Bappelitbangda periode sebelumnya dengan sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi, juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya.

Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Bappeda terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Bappeda. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.4..dan 3.5. berikut :



Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas                                 | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda  | Sebagai Faktor   |   |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 1.  | Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel | Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan . | Belum adanya pengembangan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) yang berbasis kompetensi.  | Adanya jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang cukup memadai.   |
|     |  | Belum mengacunya dokumen rencana pembangunan secara konsisten terhadap dokumen nasional.           | Pedoman kerja yang masih relatif terbatas dan masih memerlukan penataan.   | Adanya sistem data yang cukup memadai   |
|     |  | Perencanaan pembangunan yang implementasinya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.         | Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan nasional. | Adanya sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur pemerintah yang cukup memadai untuk rencana pembangunan |
|     |  |  |  |   |
| 2.  | Manajemen Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih                    | Manajemen sistem kelembagaan Bappelitbangda masih belum optimal.                                   | Tugas dan fungsi masih belum dipahami secara maksimal.   | Adanya SDM dengan tingkat pendidikan S2.  |
|     |  |  | Intensitas, kuantitas dan kualitas koordinasi masih kurang.  | Adanya SDM yang mengikuti Diklat Fungsional   |
|     |  |  | Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal.   |   |

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap Renstra Bappenas



Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur                                    | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda   | Sebagai Faktor   |   |
|-----|---|---|--|---|
|     |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 1.  | Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja.                                    | Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja oleh sumber daya aparatur Bappelitbangda. | Keengganan sumber daya aparatur untuk mempergunakan/mempelajari fasilitas baru yang tersedia di Bappelitbangda.              | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kinerja sumber daya aparatur Bappelitbangda. |
| 2.  | Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia   | Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. | Belum adanya pengembangan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) yang berbasis kompetensi.                                      | Adanya jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang cukup memadai.                             |
| 3.  | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan keuangan.                                    | Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan keuangan yang berbasis teknologi informasi.        | Ketersediaan sarana pendukung kinerja berbasis teknologi informasi belum ada.  | Adanya data sistem pelaporan keuangan yang memadai.   |
| 4.  | Tersedianya pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan.                       | Pedoman perencanaan yang masih relatif terbatas dan masih memerlukan penataan.                    | Belum keseluruhan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan Bappelitbangda mengacu pada perencanaan pembangunan nasional. | Adanya sistem data yang cukup memadai.  |
| 5.  | Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan                  | Lemahnya upaya pembinaan dan sosialisasi terhadap perencanaan pembangunan.                        | Persepsi yang berbeda terhadap Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.   | Adanya program kegiatan pembinaan dan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan              |
| 6.  | Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan. | Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan perencanaan pembangunan..                     | Intensitas dan kuantitas koordinasi antar SKPD-SKPD terkait perencanaan pembangunan belum optimal.                           | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang rutin dilaksanakan.                       |
| 7.  | Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan.                                       | Kurangnya koordinasi antar SKPD-SKPD terkait.   | Intensitas dan kuantitas koordinasi antar SKPD-SKPD terkait belum optimal.   | Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang   |



**Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu  
Tahun 2018-2022**

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur                          | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda   | Sebagai Faktor   |   |
|-----|---|---|--|---|
|     |   |   | Penghambat   | Pendorong   |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
|     |   |   |  | rutin dilaksanakan.   |
| 8.  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan.                                  | Belum diacunya dokumen rencana pembangunan daerah secara konsisten terhadap dokumen nasional.                 | Kekurangmampuan/keengganan sumber daya aparatur untuk memahami pedoman dokumen perencanaan daerah. | Adanya dokumen perencanaan yang cukup memadai.                |
| 9.  | Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan.             | Terkendalanya data dan informasi yang belum sepenuhnya lengkap dan masih belum mengacu pada dokumen nasional. | Data yang disajikan masih mengacu pada dokumen sebelumnya.   | Adanya data yang cukup memadai.                               |
| 10. | Terlaksananya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. | Tidak atau belum dilaksanakannya evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah.               | Evaluasi yang memerlukan waktu lama sehingga terhambat dalam pelaksanaannya.                       | Adanya laporan implementasi kegiatan pembangunan.             |
| 11. | Tersedianya sistem pelaporan hasil-hasil pembangunan.                         | Belum diacunya sistem pelaporan dokumen hasil-hasil pembangunan terhadap dokumen nasional.                    | Sistem pelaporan dokumen hasil-hasil pembangunan masih mengacu pada dokumen sebelumnya.            | Adanya laporan pelaksanaan/implementasi kegiatan pembangunan. |

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap Renstra Bappeprov.





### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda juga digali dari keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi, juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Bappeda terhadap RTRW dan KLHS menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Bappeda. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.6..dan 3.7. berikut :



Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda  | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda  | Sebagai Faktor   |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.  | Perencanaan pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota yang mencakup :<br>a. Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa<br>b. Pusat kegiatan sektor perumahan.<br>1) Perumahan pusat kota<br>2) Perumahan real estate dan perumahan wisata<br>3) Perumahan agropolis<br>c. Pusat kegiatan sektor perkantoran.<br>1) Perkantoran pemerintahan.<br>2) Perkantoran swasta<br>d. Pusat kegiatan sektor pariwisata.<br>1) Pariwisata buatan.<br>2) Pariwisata alam.<br>3) Pariwisata budaya..<br>e. Pusat kegiatan sektor industri.<br>1) Industri rumah tangga/kecil.<br>2) Industri ringan.<br>f. Pusat sentra produksi pertanian dan | a. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan Bappelitbangda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang .<br><br>b. Penurunan daya dukung lingkungan yaitu menurunkan sumber daya air, tanah,dan udara akibat alih fungsi lahan. | a. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan.<br><br>b. Keterbatasan sumber daya perencana yang berkualitas.<br><br>c. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin padat.<br><br>d. Regulasi rencana pengembangan industri belum terkoodinir dengan baik. | Adanya anggaran untuk perencanaan pengembangan pusat pelayanan kota dan sumber daya yang memadai.. |



| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda  | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda  | Sebagai Faktor   |   |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   |
|     | <p>pengembangan agropolitan.</p> <p>g. Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelayanan pendidikan.</li><li>2) Pelayanan Kesehatan.</li><li>3) Rekreasi dan olahraga.</li><li>4) Pelayanan bina sosial.</li><li>5) Pelayanan peribadatan.</li><li>6) Pelayanan persampahan</li><li>7) Pelayanan komunikasi.</li></ol>   |  |  |   |
| 2.  | <p>Perencanaan pengembangan sistem jaringan prasarana kota yang mencakup :</p> <p>a. Sistem jaringan transportasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan jaringan jalan (jalan kolektor sekunder, jalan lokal/jalur rute wisata)</li><li>2) Rencana pengembangan terminal dan halte (jalur angkutan dan terminal penumpang).</li></ol> <p>b. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sistem jaringan sumberdaya air regional.</li><li>2) Wilayah sungai di wilayah Kota Batu.</li><li>3) Sistem jaringan irigasi.</li></ol> | <p>a. Perencanaan pembangunann yang Belum optimal karena adanya alih fungsi lahan RTH.</p> <p>b. Penurunan daya dukung lingkungan hidup karena adanya penurunan daerah resapan air untuk pengembangan rencana jaringan transportasi.</p> | <p>a. Keterbatasan sumber daya perencana yang berkualitas (SDM aparatur yang berkompeten).</p> <p>b. Tuntutan publik akan fasilitas umum yang lebih baik lagi.</p> | <p>Adanya Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai.</p> |



| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda  | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda | Sebagai Faktor |           |
|-----|--|---------------------------------------|----------------|-----------|
|     |  |                                       | Penghambat     | Pendorong |
| 1   | 2  | 3                                     | 4              | 5         |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih.</li><li>5) Pengendalian bajir di wilayah Kota Batu.</li><li>c. Sistem jaringan energi dan kelistrikan</li><li>d. Sistem jaringan telekomunikasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sistem kabel.</li><li>2) Sistem nirkabel.</li><li>3) Sistem satelit.</li></ul></li><li>e. Sistem jaringan persampahan, sanitasi, dan drainase.<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sistem pewadahan sampah</li><li>2) Sistem pengumpulan sampah</li><li>3) Sistem pemindahan sampah</li><li>4) Sistem pengangkutan sampah</li><li>5) Sistem pembuangan akhir sampah.</li><li>6) Drainase primer</li><li>7) Drainase sekunder</li><li>8) Drainase tersier</li></ul></li><li>f. Sistem jaringan lainnya.<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sistem Penyediaan Air</li></ul></li></ul> |                                       |                |           |



| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda  | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda  | Sebagai Faktor  |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 3.  | Perencanaan pengembangan kawasan lindung yang mencakup :<br>a. Kawasan hutan lindung.<br>b. Kawasan resapan air.<br>c. Kawasan perlindungan setempat.<br>d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.<br>e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya.<br>f. Kawasan rawan bencana alam.   | a. Rencana pembangunan yang belum optimal.<br><br>b. Penurunan jasa ekosistem yaitu berkurangnya kawasan lindung akibat alih fungsi lahan hutan.               | Kurangnya pengawasan terhadap kelestarian hutan.            | Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan di wilayah hutan. |
| 4.  | Perencanaan pengembangan kawasan budidaya yang mencakup :<br>a. Kawasan hutan produksi.<br>b. Kawasan perumahan.<br>c. Kawasan perdagangan dan jasa.<br>d. Kawasan perkantoran.<br>e. Kawasan industri.<br>f. Kawasan pariwisata.<br>g. Ruang Terbuka Non Hijau.<br>h. Ruang evakuasi bencana.<br>i. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.<br>j. Kawasan pertanian.<br>k. Pelayanan umum.<br>l. Kawasan pertahanan dan keamanan. | c. Rencana pembangunan yang belum optimal yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.<br><br>d. Rencana pembangunan yang menyebabkan alih fungsi lahan. | Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. | Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan di wilayah hutan. |

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap RTRW Kota Batu.



Tabel 3.7.

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu berdasarkan Analisis KLHS  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda   | Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda   | Sebagai Faktor   |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | Penghambat   | Pendorong  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.  | Adanya alih fungsi lahan karena keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan.       | Belum optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan Bappelitbangda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang. | Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan daerah. | Adanya jumlah sumber daya manusia di Bappeda dan SKPD lain yang memadai.   |
| 2.  | Perubahan daya dukung lingkungan hidup terhadap kualitas penurunan sumber daya air. | Regulasi yang belum optimal dalam rencana kegiatan pertanian maupun industri.   | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan pertanian maupun industri dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan perairan. | Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air bersih dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air. |
| 3.  | Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan luas lahan kawasan hutan lindung.        | Kualitas perencanaan masih belum optimal karena penerapan tata ruang yang kurang konsisten .  | Managemen sistem kelembagaan Bappeda yang belum optimal.   | Adanya pengendalian pelaksanaan program kegiatan Bappeda.  |
| 4.  | Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan keanekaragaman hayati.                   | Penerapan tata ruang yang kurang konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.  | Sistem pertanian/perkebunan yang cenderung monokultur dan tidak menggunakan tanaman introduksi .                               | Adanya program pertanian organik dan pengendalian pelaksanaan progam kegiatan SKPD.  |



### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dasar penentuan isu-isu strategis adalah berbagai permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor penghambat dan pendukung yang telah diidentifikasi melalui gambaran pelayanan Bappeda, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi, implikasi RTRW, dan implikasi KLHS. Penanganan isu strategis tetap harus sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappelitbangda Kota Batu pada periode tahun 2017-2022 adalah :

1. *Inconsistency* antara rencana pembangunan dan implementasinya yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan nasional dan daerah.
3. Kekurangmampuan atau keengganan sumber daya aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
4. Tidak atau belum dilaksanakannya evaluasi terhadap implementasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
5. Tidak atau belum dilaksanakannya evaluasi terhadap implementasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
6. Kekurangmampuan atau keengganan sumber daya aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
7. Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan penyajian data.
8. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan.
9. Perubahan lingkungan strategis.
10. Ketidakberlanjutan pembangunan di daerah.
11. Kemerosotan mutu lingkungan dan sumber daya alam.
12. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.
13. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
14. Pengembangan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
15. Peningkatan posisi kepariwisataan Kota Batu menjadi kepariwisataan internasional.
16. Optimalisasi investasi daerah.
17. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan.



18. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
19. Pengembangan infrastruktur khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, dan sarana prasarana lalu lintas.
20. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
21. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik harmonis dan demokratis.
22. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.
23. Penataan pedagang kaki lima.
24. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh PemKota Batu.
25. Masalah sanitasi perkotaan.
26. Masalah drainase perkotaan.
27. Masalah persampahan.
28. Pemetaan tenaga kerja.
29. Pengembangan sistem penyediaan air minum.
30. Pengelolaan air limbah.
31. Penataan tata ruang wilayah.
32. Peningkatan peran serta seluruh *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan.
33. Peningkatan angka kemiskinan.





## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Bappelitbangda memiliki tujuan *Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan*.

Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program, dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam periode kerja 2018-2022 Bappelitbangda Kota Batu menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi Bappepelitbang, yang tersaji dalam tabel 4.3 berikut.



Tabel 4.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu

| No. | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran   | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |  |  | 2018                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                                   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 1.  | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                       | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD                       | 80%                                   | 85%  | 87%  | 89%  | 90%  |
|     |   |  | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD                              | 80%                                   | 85%  | 87%  | 89%  | 90%  |
| 2.  |   | Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan | Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | 60%                                   | 70%  | 80%  | 90%  | 95%  |

Sumber : Hasil analisis dan perencanaan.



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

### **4.1. Strategi dan Kebijakan Bappeda**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dalam periode kerja 2018-2022 Bappelitbangda Kota Batu menetapkan strategi dan kebijakan yang tabel 4.1 berikut.



Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>VISI</b>   | <b>BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA</b> |   |   |
| <b>MISI V</b>   | <b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional</b>        |   |   |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah   | <p>a. Melibatkan pihak internal maupun eksternal yang berkompeten dengan tata cara dan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan.</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam hal sosialisasi dan pembinaan aparatur yang bertugas menangani perencanaan pembangunan dan penganggaran.</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh SKPD</p> | a. Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh SKPD |
|   | 2. Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan   | <p>a. Melakukan pembahasan pembentukan kerangka kelitbang melalui forum diskusi/desk</p> <p>b. Merumuskan mekanisme pemanfaatan kajian kedepannya</p>   | a. Meningkatkan ketepatan pola dan mekanisme kelitbang dalam penentuan kajian/penelitian dan upaya pemanfaatannya                         |



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Bappelitbangda Kota Batu telah menetapkan serangkaian rencana program dan kegiatan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappelitbangda. Adapun program-program dan kegiatan sebagaimana dalam Tabel T-C.27 sebagai berikut:



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2018-2022 telah menetapkan berbagai indikator kinerja terkait dengan berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait. Termasuk beberapa urusan yang harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan yang menjadi tanggung-jawab Bappelitbangda adalah urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang, yang didalamnya telah ditetapkan beberapa indikator capaian kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018-2022 mengacu indikator kinerja Bappelitbangda berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022 yang tersaji dalam tabel 7.1.



Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator Kinerja  | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |  |   | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| (1) | (1)  | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                                      |
| 1   | Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)  | C                                       | B                           | BB   | BB   | A    | A    | A  |
| 2   | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD                       | NA                                      | 80%                         | 85%  | 87%  | 89%  | 90%  | 90%                                      |
| 3   | Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD                              | NA                                      | 80%                         | 85%  | 87%  | 89%  | 90%  | 90%                                      |
| 4   | Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | NA                                      | 60%                         | 70%  | 80%  | 90%  | 95%  | 95%                                      |

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Batu berisikan penjabaran visi dan misi Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Batu. Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Batu disusun dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, potensi unggulan lokal Kota Batu, dengan memperhatikan indikator, tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022. Cita-cita Bappelitbangda Kota Batu adalah mewujudkan perencanaan yang terpadu, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Hasil implementasi rencana strategis Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018-2022 akan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Bappelitbangda Kota Batu dan secara langsung akan dapat memberikan kontribusi keberhasilan pembangunan daerah Kota Batu. Hasil tersebut dapat di lihat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batu.

**Kepala BAPPELITBANGDA  
Kota Batu**

**M. CHORI, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19690308 198911 1 001